

# KONSEP PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Eksistensi dan Nilai-nilai Urgensinya di Indonesia)

**BADRUDIN**

Dosen Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab  
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
badrudin1975@yahoo.com

## **Abstrak**

Tujuan dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk memahami pelajar, mahasiswa, dan semua warga agar memperoleh inspirasi pengetahuan, sikap dan tindakan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran kemanusiaannya pada masyarakat *demokrasi-pluralistik* serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragama agar tercipta sebuah tatanan masyarakat etis dan bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Prinsip multikulturalisme mengajarkan kepada kita untuk mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis. Berangkat dari prinsip demikian maka individu maupun kelompok dari berbagai etnik dalam pandangan ini bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Sehingga keberagaman budaya yang ada di belakang, di depan dan disekeliling kita bisa memberikan sumbangan yang paling berharga bagi semua orang. Pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan Negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, dapat meng-*interpretasi*-kan tentang kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan *stereotype* dan mau menghargai semua orang.

**Kata Kunci:** *Multikultural, etnis, dan budaya*

## A. Pendahuluan

Kemajemukan dalam hidup merupakan *sunnatullah*. Islam sebagai agama mengakui adanya kemajemukan, ini sudah diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat ayat 13, QS. Hud ayat 118-119, dan QS. al-Baqarah ayat 251. Masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangannya, dengan perbedaan tersebut diharapkan bisa saling menghargai dan menghormati dengan hidup rukun dan damai. Dalam pendidikan multikultural ini kita diajarkan untuk tidak mendiskriminasi terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dengan kita. Keragaman ini merupakan keniscayaan, orang yang tidak menerimanya berarti kembali pada hidup zaman pra-sejarah.<sup>1</sup>

Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Pendidikan multikultural hadir di sini diharapkan dapat menghapus sikap diskriminasi yang ada dalam lingkungan sosial yang beragam ini. Oleh karena itu salah satu upaya untuk bisa menghargai adanya perbedaan adalah dengan memberikan pendidikan multikultural.<sup>2</sup>

Hal tersebut memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada peserta didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan lain. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dalam menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Sedangkan tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu siswa, mahasiswa, dan semua warga agar memperoleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran se-efektif mungkin pada masyarakat *demokrasi-pluralistik* serta diperlukan untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Pendidikan multikultural didasari pada konsep kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap orang dan masyarakat. Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan *bhineka tunggal ika* serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Oleh sebab itu mungkinkah membangun sebuah konsep multikulturalisme dalam pendidikan di Indonesia ? Dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai konsep multikultural, eksistensi pendidikan multikultural, dan nilai urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Insya Allah, semoga bermanfaat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Konsep Multikultural**

Multikulturalisme secara etimologis banyak digunakan sekitar tahun 1950-an di Kanada.<sup>3</sup> Multikulturalisme ini berakar kata dari istilah multikultural. Sebagai sebuah ide, pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka.<sup>4</sup> Adapun gerakan multikultural muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan lain-lain. Dalam multikulturalisme menegaskan bahwa dengan segala perbedaannya itu manusia adalah sama di dalam ruang public sehingga dibutuhkan kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-

bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif (istilah 'monokultural' juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (*pre-existing homogeneity*)). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.<sup>5</sup>

Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (*English-speaking countries*), yang dimulai di Afrika pada tahun 1999.<sup>6</sup> Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Perancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme.<sup>7</sup> Perubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dan Jerman, dan beberapa negara lainnya. *Multikulturalisme* akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural.

Multikultural merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, meski didalamnya ada kompleksitas perbedaan.<sup>8</sup> Pinsip multikulturalisme mengajarkan kepada kita untuk mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap kelompok etnis. Berangkat dari prinsip demikian maka individu maupun kelompok dari berbagai etnik dalam pandangan ini bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas etnis dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat. Sehingga keberagaman budaya yang ada di belakang, di depan dan disekeliling kita bisa memberikan sumbangan yang paling berharga bagi semua orang.

Menurut Dadang Kahmad<sup>9</sup> keberagaman adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. Realitas itu merupakan keniscayaan alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Keragaman didesain Allah. Pada kenyataannya terdapat

keragaman, kemajemukan atau kebhinekaan tersebut. Sebagai bukti Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang Mengetahui."*<sup>10</sup>

*"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*<sup>11</sup>

## **2. Pendidikan Multikultural dan Kebudayaan**

Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.<sup>12</sup> Pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (global).<sup>13</sup>

Oleh karena itu antara pendidikan multikultural dan kebudayaan sangat berkaitan. Budaya merupakan pikiran dan akal budi.<sup>14</sup> Kebudayaan berasal dari bahasa Sansakerta yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan "daya" berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.<sup>15</sup> Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan (adat, akhlak, kesenian , ilmu dan lain-lain). Sedang ahli sejarah mengartikan kebudayaan sebagai warisan atau tradisi. Bahkan ahli Antropogi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, *way of life*, dan kelakuan.

Sejak 1871, E. B. Tylor yang dikutip oleh A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>16</sup> Sedangkan J.J. Honigman (1954) membedakan pada fenomena kebudayaan atau wujud kebudayaan yang memahaminya dengan sistem budaya (sistem nilai, gagasan-gagasan, dan norma-norma), sistem sosial (kompleks aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat), dan artefak kebudayaan fisik.<sup>17</sup> Menurut Koentjaraningrat,<sup>18</sup> unsur-unsur universal dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini adalah : (1) sistem religi dan upacara keagamaan, (2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian hidup, dan (7) sistem teknologi dan peralatan. Dari ketujuh macam ini bila diperdalam terkandung nilai-nilai pendidikan dalam konteks kehidupan sosial.

Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Dari sinilah muncul istilah multikulturalisme. Banyak definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam *“politics of recognition”* (Azyumardi Azra, 2007). Lawrence Blum mengungkapkan bahwa multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Oleh karena itu,

secara hakiki istilah *multikulturalisme* terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.<sup>19</sup>

Pendidikan multikultural (*Multikultural Education*) merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi lembaga pendidikan, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non Eropa (Hilliard, 1991-1992). Sedangkan secara luas, pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti *gender*, *etnik*, ras, budaya, *strata sosial* dan agama. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti (*difference*), atau *politics of recognition* (politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas).<sup>20</sup>

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan Negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, dapat meng-*interpretasi*-kan tentang kebangsaan dan budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan *stereotype* dan mau menghargai semua orang.<sup>21</sup>

Kurikulum pendidikan multikultural hendaknya mencakup subjek-subjek seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan *etno-kultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan *pluralitas*, *multikulturalisme*, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan. Kajian ini bisa disebut dengan Cultural studies.<sup>22</sup> *Cultural studies* tidak memiliki suatu wilayah subjek yang didefinisikan secara jelas dan terang. Ia hanya bertitik pijak pada sebuah gagasan tentang budaya yang sangat luas dan yang mencakup segala hal yang digunakan untuk menggambarkan dan mempelajari beraneka macam praktik keseharian manusia.<sup>23</sup>

Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut untuk berpegang pada prinsi-prinsip berikut ini : (1) Pendidikan multikultural harus menawarkan beragam kurikulum yang *me-representasi*-kan pandangan dan *perspektif* orang banyak, (2) Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah, (3) Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandang kebudayaan yang berbeda-beda, (4) Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise, tentang ras, budaya dan agama.

Nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Menurut Gay's sebagaimana dikutip oleh Dian Mutiarasari (2010) prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas dan bersifat komprehensif dan mencakup semua level pendidikan. Jadi, isi dari pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain.

Sesuai prinsip pendidikan multikultural, maka aktivitas pembelajaran di sekolah disarankan untuk memberi perhatian pada kompleksitas dinamis dari berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi manusia, seperti fisik, mental, kemampuan, kelas, gender, usia, politik, agama dan etnisitas. Pendidikan multikultural biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a) Tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya (berperadaban)”.
- b) Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (*cultural*).
- c) Metodanya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis).
- d) Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

### 3. Nilai Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia<sup>25</sup>

Fenomena Multikultural yang terjadi di Indonesia dapat dipahami dengan realitas : (1) Letak geografis Indonesia (2) perkawinan campur (3) iklim. Walaupun demikian, di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang *heterogen*, terlebih pada masa otonomi dan *desentralisasi* yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai *counter* terhadap kebijakan *desentralisasi* dan *otonomi daerah*. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional. Oleh karena itu, cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun kembali dari hasil perombakan tatanan kehidupan yang dibangun oleh rezim Orde Baru.<sup>26</sup>

Menurut Azyumardi Azra (2007), pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa orde baru memaksakan "*monokulturalisme*" yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik, yang bukan tidak mengandung implikasi-implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi kekuasaan pemerintahan, terjadi peningkatan gejala "*provinsialisme*" yang hampir tumpang tindih dengan "*etnisitas*". Kecenderungan ini, jika tidak terkendali akan dapat menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, tetapi juga disintegrasi politik.<sup>27</sup>

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif.

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan

kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam meruapakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada perang dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali. Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi "dendam sejarah" di berbagai wilayah.

Model lainnya adalah pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. *Affirmative action* dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Contoh yang lain adalah model "sekolah pembauran" Iskandar Muda di Medan yang memfasilitasi interaksi siswa dari berbagai latar belakang budaya dan menyusun program anak asuh lintas kelompok. Di Amerika Serikat bersamaan dengan masuknya wacana *multikulturalisme*, dilakukan berbagai lokakarya di sekolah-sekolah maupun di masyarakat luas untuk meningkatkan kepekaan sosial, toleransi dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri; (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat.

Menyusun pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan anatar kelompok mengandung tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas "merayakan keragaman" belaka. Namun perlu disadari kepada masyarakat bahwa *pluralitas* dalam masyarakat adalah *sunnatullah* (sudah menjadi

ketentuan Ilahy).<sup>28</sup> Apalagi jika tatanan masyarakat yang ada masih penuh *diskriminasi* dan bersifat *rasis*. Dapat pula dipertanyakan apakah mungkin meminta masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami *diskriminasi* atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut? Dalam kondisi demikian pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai *advokasi* untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: *pertama*, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (education) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer menegembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

*Kedua*, menghindari pandangan yang mempersepsikan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang *relatif self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

*Ketiga*, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis

terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

*Ke-empat*, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Yakni kebudayaan yang akan diadopsi dan ditentukan oleh situasi. Demikian juga pendidikan multikultural berusaha meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan *multikulturalisme* sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Dalam konteks keindonesiaan dan kebhinekaan, ke-empat pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terjewantahkan dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu.<sup>29</sup> Jadi dapat dipahami inti masyarakat adalah kumpulan besar individu yang hidup dan bekerja sama dalam masa relatif lama, sehingga individu-individu dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menyerap watak sosial. Kondisi itu selanjutnya membuat sebagian mereka menjadi komunitas terorganisir yang berpikir tentang dirinya dan membedakan ekstensinya dari ekstensi komunitas. Dari sisi lain, apabila kehidupan di dalam masyarakat berarti interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Maka yang menjadikan pembentukan individu tersebut adalah pendidikan atau dengan istilah lain masyarakat pendidik.

Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah eksistensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.

- 2) Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
- 3) Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.
- 4) Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
- 5) Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang memnuntunya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

Bila penjelasan di atas ditarik di dalam dunia pendidikan, maka masyarakat sangat besar peranan dan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan kepribadian individu peserta didik. Sebab keberadaan masyarakat merupakan laboratorium dan sumber makro yang penuh alternatif untuk memperkaya pelaksanaan proses pendidikan. Untuk itu, setiap anggota masyarakat memiliki peranan dan tanggung jawab moral terhadap terlaksananya proses pendidikan. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pendidikan. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam dunia pendidikan merupakan satu hal penting untuk kemajuan pendidikan. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu (Linton), maka konsep masyarakat tersebut jika digabungkan dengan multikultural memiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, *multikulturalisme* yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi *sosio-kultural* maupun *geografis* yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana setiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu

masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Jika dipahami multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap hak-hak kelompok masyarakat lain, maka Indonesia sebenarnya sudah lama menganut sistem ini. Hal ini terlihat dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Paling tidak prinsip ini menekankan tentang kebebasan dalam mengekspresikan hidupnya sesuai dengan budaya dan kepercayaannya.<sup>31</sup> Namun konsep ini tentunya harus memenuhi landasan-landasan etika agama dan prinsip-prinsip akhlakul karimah.

### 3. Penutup

Pendidikan multikultural adalah suatu penedekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Sedangkan dalam doktrin Islam sebenarnya tidak membedakan etnik, ras dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Swt. Dalam Islam, pendidikan multikultural mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah *perspektif monokultural* yang *esensial*, penuh prasangka dan *diskriminatif* ke *perspektif multikulturalis* yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Dunia pendidikan tidak boleh terasing dari perbincangan realitas multikultural tersebut. Bila tidak disadari, janaan-janaan dunia pendidikan turut mempunyai andil dalam menciptakan ketegangan-ketegangan sosial. Oleh karena itu, di tengah gegap gempita lagu nyaring "tentang kurikulum berbasis kompetensi", harus menyelip dalam rasionalitas kita bahwa pendidikan bukan hanya sekedar mengajarkan "ini" dan "itu", tetapi juga

mendidik anak kita menjadi manusia berkebudayaan dan berperadaban. Dengan demikian, tidak saatnya lagi pendidikan mengabaikan realitas kebudayaan yang beragam tersebut.

### Catatan akhir:

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Tsaqafah, vol. 1, No. 2, 2003, hal. 3.

<sup>2</sup> Rumbang Sirojudin, *Jurnal Tazkiya*, dalam tema *Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2011, hal. 90.

<sup>3</sup> Dadang Kahmad, *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2011), cet. I, hal. 32. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan (lihat dalam makalah Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Multikultural", dalam Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002). Kata multikulturalisme dibentuk dari akar kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Lebih lanjut lihat dalam <http://www.grasindo.co.id/Detail.asp?ID=50104457> atau pada H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme, Tantangan Global Masa Depan*. (Jakarta: Grasindo, 2004).

<sup>4</sup> Parsudi Suparlan. (2002: 2-3). "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli. Sumber: <http://maulanusantara.wordpress.com/2008/04/30/pendidikan-multikultural-dalam-tinjauan-pedagogik/> (1 Juni 2012 pukul 3:15 AM).

<sup>5</sup> Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme#Definisi> (30 Mei 2012)

<sup>6</sup> See Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism*. Toronto: Penguin, 2002. ISBN 978-0-14-100676-5.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 63.

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, hal. 119.

<sup>10</sup> QS. Al-Rum: 22.

<sup>11</sup> QS. Al-Hujurat:13.

<sup>12</sup> Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme#Definisi> (30 Mei 2012)

<sup>13</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 168.

<sup>14</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), cet. VIII, hal. 157.

<sup>15</sup> *Ibid.* Dalam beberapa definisi menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan sangatlah luas. Untuk memudahkan pembahasan, *Ernst Cassirer* membaginya menjadi lima aspek : 1. Kehidupan Spritual 2. Bahasa dan Kesustraan 3. Kesenian 4. Ilmu Pengetahuan dan 5. Sejarah.

---

<sup>16</sup> A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn, *Cultural: A Critical Review of Concepts and Definitions*, (Massachusset: The Museum, 1952), h. 43.

<sup>17</sup> Budaya adalah Pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat (Taylor, 1897). Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama Islam juga memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama Islam memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama Islam adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Di sisi lain budaya memasukkan dunia ke wilayah manusia, kemudian menyebabkan manusia mengolah tanah dan membangun rumah (bangunan) sehingga menjadi halaman gerak manusia. Lihat Mawardi dan Nur Hidayati, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. V, h. 183.

<sup>18</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), cet. IX, h. 2.

<sup>19</sup> Pendidikan multikultural bagi bangsa Indonesia belum menjadi acuan, berbeda halnya pendidikan multikultural ini di belahan Negara Eropa dan Amerika. Pendidikan multikultural ini memiliki beberapa istilah lain seperti dengan sebutan : *intercultural education*, *interetnik education*, *transcultural education*, *multietnic education*, dan *cross-cultural education* (Rumbang Sirojudin, *Op.Cit.*, hal. 91).

<sup>20</sup> Dian Mutiarasari, *Makalah Pendidikan Multikultural Dan Isu Difabel*, (Yogyakarta: Prodi Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2010). Menurut James A. Banks tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikulturalisme dimaksudkan untuk membantu para peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan ketrampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain. Masih menurut James, substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as "education for freedom"*) sekaligus sebagai penyebar luasan gerakan inklusif dalam rangka memperoleh hubungan antar sesame (*as inclusive and cementing movement*). Pendidikan multikultural bersifat antirasis, mendasar, penting (berguna) ntuk semua siswa, pervasive (dapat meresap/menembus/merembes), untuk keadilan social serta merupakan sebuah proses dan *pedagogi* kritis.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Cultural studies* muncul pada abad ke-18 dan 19 di Eropa. Istilah ini mengandung arti sebuah proses pemeliharaan (pengolahan) atau pengembangan. Kemudian, pada abad ke-19, istilah ini mengacu pada

---

perbaikan dan kemajuan individu, terutama melalui proses pendidikan, kemudian juga dipenuhinya aspirasi dan cita-cita manusia. Lihat Sandi Suwandi Hasan, *Pengantar Cultural Studies*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), cet. I, hal. 5.

<sup>23</sup> Kajian *Cultural Studies* ini merambah hamper seluruh wilayah pengetahuan. Maka tidak mengherankan jika ia berbeda dengan disiplin-disiplin ilmu yang konvensional. *Cultural Studies* tak memiliki subjek studi atau afiliasi disiplin ilmu yang tunggal. *Ibid.*, hal. 5-6.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Sumber: <http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html> (1-6-2012)

<sup>26</sup> Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), cet. V, hal.235.

<sup>27</sup> <http://www.kongresbud.budpar.go.id/58%20ayyumardi%20azra.htm>

<sup>28</sup> Zaki Ghufron, lihat *Jurnal Tazkiya*, dalam tema *Pluralisme dan Pola Pendekatan Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011, hal. 181.

<sup>29</sup> Pendapat ini juga dikemukakan oleh Zakiah Darajat yang menyatakan, bahwa masyarakat secara sederhana diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan dan agama.

<sup>30</sup> Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme#Definisi> (30 Mei 2012).

<sup>31</sup> Tsaqafah, vol. 1, No. 2, 2003, hal. 3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Aly. “*Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia*”, dalam *Jurnal Ishraqi*, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003.
- Ahmad Rivai Harahap, “*Multikulturalisme dan Penerapannya dalam pemeliharaan kerukunan Umat Beragama*”, 2004.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Deskonstruksi Epistemologi Modern*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006.
- Al-Munawwar, Said Aqil Husin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, Cet. I, 2003.

- 
- Amir, Muhammad, *Konsep Masyarakat Islam*, Jakarta, Fikanati, Aneska, 1992.
- Analisis CSIS, tahun XXX/2001, No. 3.
- Azyumardi Azra, "Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia", 2007.
- Banks, James A. (ed.). *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989..
- Buku informasi tentang Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika: Menuju Masyarakat Multikultural*, 16-19 Juli 2002, di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
- Cardinas, Jose A.. *Multicultural Education: A Generation of Advocacy*. America: Simon & Schuster Custom Publishing, 1975.
- Edgerton, Susan Huddleston. *Translation The Curriculum Multiculturalism into Cultural Studies*. New York-London: Routledge Press, 1996..
- Ekstrand, L.H. "*Multicultural Education*," dalam Saha, Lawrence J. (eds.). 1997.
- Elashmawi, Farid & Harris, Philip R. *Multicultural Management: New Skills for Global Success*. 1994.
- Garcia, Ricardo L. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher, 1982..
- Gollnick, Donna M. *Multicultural Education in a Pluralistik Society*. London: The CV Mosby Company, 1983..
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet. V, 2011.
- Dadang kahmad, *Multikulturalisme dalam Perspektif Islam*, Bandung, Pustaka Al-Kasyaf, cet. I 2011.

---

DEPAG RI dan IRD, Majalah: *Inovasi Kurikulum: Kurikulum Berbasis Multikulturalism*, Edisi IV, Tahun 2003.

Dewey, John, *Democracy and Education*, New York: The Mac Millan Company, 1964

Dian Mutiarasari, *Makalah Pendidikan Multikultural Dan Isu Difabel*, Prodi Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

Hery Noer Aly dkk, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta, Friska Agan Insani, 2000.  
Freire, Paulo, *Pendidikan pembebasan*, Jakarta, LP3S, 2000.

Leo Suryadinata, dkk. *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003..

Lynch, James. *Multicultural Education: Principles and Practice*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.

Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism*. Toronto: Penguin, ISBN 978-0-14-100676-5. 2002.

Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3 (16-21 Juli 2002), Denpasar, Bali.

Sandi Suwandi Hasan, *Pengantar Cultural Studies*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, cet. I, 2011.

See Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism*. Toronto: Penguin, 2002. ISBN 978-0-14-100676-5.

Stavenhagen, Rudolfo, *Education for a Multikultural world*, in Jasque Delors (et all), *Learning: the treasure within*, Paris, UNESCO, 1996.

*Tazkiya*, dalam tema *Pluralisme dan Pola Pendekatan Kerukunan Umat Beragama*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2011.

---

Tilaar, H. A. R, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2002.

*Tsaqafah : Membangun Budaya Cerdas Menjawab Tantangan Zaman*, Vol. 1, No. 2, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya. Jogjakarta: Media Wacana.

Zakki Mubarak, dkk. Buku Ajar II, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian terintegrasi (MPKT) cet. Kedua. Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat, . Depok: Penerbit FE UI. 2008.

Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

<http://www.duniaesai.com/antro/antro3.html>

[http://www.findarticle/cf\\_0/92602/0003/2602000388/p1/article.html?term=pluralism](http://www.findarticle/cf_0/92602/0003/2602000388/p1/article.html?term=pluralism).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme#Definisi> (30 Mei 2012) <http://re-searchengines.com/muhaemin6-04.html> (1-6-2012)

[http://www.educationworld.com/a\\_admin/admin/admin299.shtml](http://www.educationworld.com/a_admin/admin/admin299.shtml)

[http://www.educationworld.com/a\\_curr/curr161.shtml](http://www.educationworld.com/a_curr/curr161.shtml).

[http://www.educationworld.com/a\\_curr/profdev012.shtml](http://www.educationworld.com/a_curr/profdev012.shtml).

<http://www.infed.org/biblio/b-curric.htm>

[http://www.educationworld.com/a\\_curr/curr155.shtml](http://www.educationworld.com/a_curr/curr155.shtml).